



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar pada tahun 2018 mencapai hasil yang baik dimana hal tersebut terlihat dari pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2018 dimana merupakan janji Kepala Dinas kepada Gubernur Kalimantan Barat. Hasil tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2018.

Hal-hal yang menjadi perhatian utama yang perlu disikapi secara serius pada tahun 2018 dan tahun-tahun ke depan adalah masih tidak stabilnya perdagangan dunia, tren peningkatan laju pertumbuhan industri pengolahan yang masih dibawah tren laju pertumbuhan ekonomi Kalbar secara keseluruhan yang berakibat pada kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kalbar yang juga terus melanjutkan tren penurunannya, tingginya laju inflasi di Kalimantan Barat yang masih diatas inflasi nasional, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berlaku, serta masih rendahnya kemampuan IKM Kalbar sebagai penggerak perekonomian rakyat untuk bersaing di pasar internasional terutama menghadapi pasar MEA.

Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja Dinas Perindag pada tahun 2018 pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Periode tahun yang bersangkutan. Sebagai penutup semoga LKJ Tahun 2018 ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga sebagai sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak,

2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,



MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP.19600310 198203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
A.1. Pendahuluan	1
A.2. Susunan Organisasi	1
A.3. Tugas dan Fungsi.....	3
A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	4
A.5. Sumber Daya Keuangan	5
A.6. Sarana Dan Prasarana.....	6
B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS	6
B.1. Perindustrian	7
B.2. Perdagangan.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
A.1. Visi.....	13
A.2. Misi	14
A.3. Moto	14
A.4 Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama	14
B. PERJANJIAN KINERJA	15
B.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS	15
B.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	18
A.1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar (SS1)	18
A.2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah (SS2).....	21
A.3 Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor (SS3).....	24
B. CAPAIAN KINERJA IKU PROVINSI.....	29
C. REALISASI ANGGARAN	35
B.1. SASARAN STRATEGIS 1 (SS1).....	36
B.2. SASARAN STRATEGIS 2 (SS2).....	37
B.3. SASARAN STRATEGIS 3 (SS3).....	37
 BAB IV PENUTUP.....	 39
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN	41
B.1. Urusan Perindustrian.....	41
B.2. Urusan Perdagangan	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai negeri sipil Dinas Perindag	4
Tabel 2	Anggaran Dilingkungan Dinas Perindag Provinsi Kalbar yang Bersumber dari APBD 2018	5
Tabel 3	Rekapitulasi Keuangan yang Bersumber dari APBN 2018	5
Tabel 4.	Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat	9
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018	15
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
Tabel 7	Indikator Kinerja Pembangunan DAerah Tahun 2018	17
Tabel 8	Capaian Kinerja SS1	18
Tabel 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
Tabel 10	Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2016 – 2018 (SS1)	19
Tabel 11	Capaian Kinerja (SS2)	21
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
Tabel 13	Perkembangan Pencapaian Target Tahunan 2016 – 2018 (SS2)	22
Tabel 14	Capaian kinerja SS3	24
Tabel 15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel 16	Perkembangan Pencapaian Target Tahunan SS 3 Tahun 2016 – 2018 (SS3)	25
Tabel 17	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2018	30
Tabel 18	Rekapitulasi realisasi Anggaran per Program	36
Tabel 19	Rekapitulasi realisasi Anggaran Dekonsentrasi APBN TA. 2018	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perindag Prov. Kalbar	2
Gambar 2	Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang	2
Gambar 3	Unit Pelatihan Industri Kecil Menengah	3
Gambar 4	Logo Aku Cinta Indonesia (100% INDONESIA).....	10
Gambar 5	Perkembangan Inflasi Bahan Makanan	23
Gambar 6	Komposisi Kontribusi Ekspor KALBAR 2018	27
Gambar 7	Komposisi Kontribusi Impor KALBAR 2018 Error! Bookmark not defined.	
Gambar 8	Perkembangan Neraca Perdagangan Kalbar 2011-2018	31
Gambar 9	Perkembangan Inflasi Kalbar 2013-2018	32
Gambar 10	Perkembangan Harga Dunia Karet dan CPO.....	34
Gambar 11	Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Industri 2012-2018	35

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	45
LAMPIRAN 2	DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	46

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1. Pendahuluan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian Dati I Kalimantan Barat dengan Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, pada Tahun 2001 berkaitan dengan diterapkannya Otonomi Daerah. Dinas ini berkedudukan di Kota Pontianak dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta merupakan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas Umum Pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis dan 1 (satu) unit pelatihan yaitu, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (UPSMB) dan Unit Unit Pelatihan Industri Pangan Olahan dan Kemasan (UPT-IPOK). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat beserta unit-unit pendukungnya dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung oleh dana APBN.

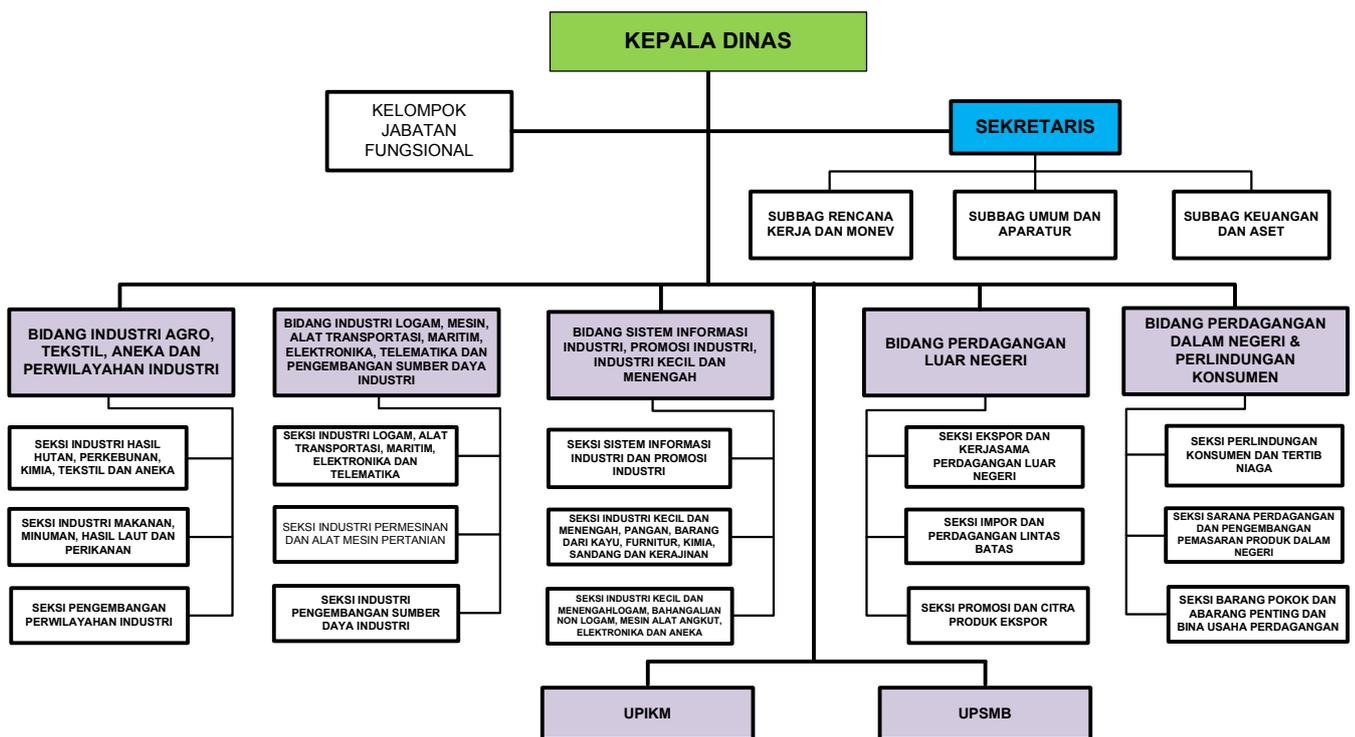
A.2. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengenai telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka atas dasar ketentuan tersebut urusan / bidang Perindustrian dan

Perdagangan menjadi tanggungjawab dan kewenangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Berikut struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAG PROV. KALBAR

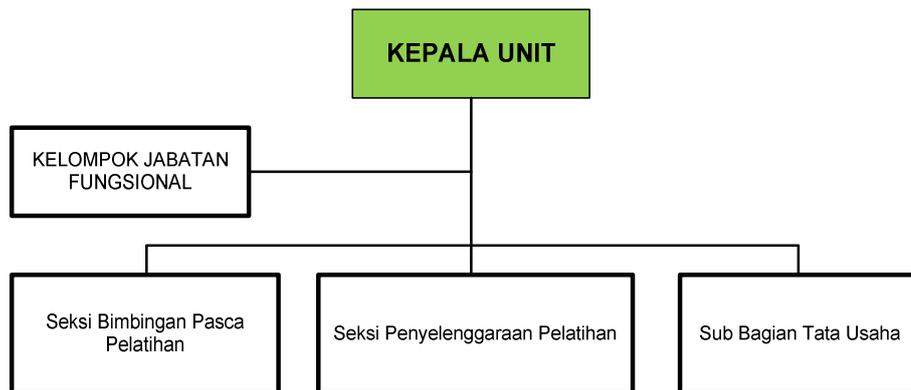


Selanjutnya untuk mengetahui struktur organisasi UPT dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar-gambar berikut :

GAMBAR 2 UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GAMBAR 3 UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH



A.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan program kerja di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- b. Perumusan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, kimia, tekstil, aneka dan perwilayahan industri, industri logam, mesin, alat transportasi, maritim, elektronika, telematika, dan pengembangan sumber daya industri, sistem informasi industri, promosi industri, industri kecil dan menengah, perdagangan luar negeri serta perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- f. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

A.4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan, didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sebagai berikut :

TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERINDAG

NO	BIDANG UPT	JMLH	ESELON			PANGKAT/GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN					
			II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	DINAS PERINDAG	84	1	4	19	0	10	64	10	13	28	8	35	0	0
2	UPSMB	18	0	1	2	0	4	13	1	1	10	-	7	0	0
3	UP IPOK	14	0	-	3	0	2	12	-	1	5	1	7	0	0
	JUMLAH	116	1	5	24	0	16	89	11	15	43	9	49	0	0

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2018.

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 116 orang, dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (D3 – S2) sebesar 57,76%, Pendidikan Menengah Atas (SLTA) sebesar 42,24%, dengan demikian secara tingkat pendidikan pada

dasarnya telah cukup memadai untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan terutama dalam mengembangkan industri dan perdagangan daerah.

A.5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2018 menerima anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung baik yang dialokasikan di Dinas itu sendiri maupun yang dialokasikan di UPT.

TABEL 2 ANGGARAN DILINGKUNGAN DINAS PERINDAG PROVINSI KALBAR YANG BERSUMBER DARI APBD 2018

KODE REKENING	INSTANSI DAN ORGANISASI	ANGGARAN BELANJA
TOTAL BELANJA		22.571.620.484,-
BELANJA TIDAK LANGSUNG		12.761.239.094,-
BELANJA LANGSUNG		9.810.381.390,-
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.465.298.323,-
2.06.01.02	UNIT PELATIHAN INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN	1.503.076.378,-
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1.842.006.689,-

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2018.

Sementara itu anggaran yang bersumber dari APBN 2018 berasal dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

TABEL 3 REKAPITULASI KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.322.000.000
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.319.188.000
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	591.989.000
TOTAL		3.233.177.000

Sumber : Dinas Perindag Prov. Kalbar, 2018.

A.6. Sarana Dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menempati kantor di jalan Sutan Syahrir no. 2 Pontianak, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa relatif nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi. Namun masih ada beberapa ruangan yang harus di perbaiki terutama lantai dua gedung lama eks-Kanwil Depperindag Prov. Kalbar yang perlu direhab. Demikian juga lingkungan kantor perlu dilakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi. Dalam pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat, sebagai SKPD Provinsi di bidang industri dan Peragangan, untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan tersedianya ruangan pameran dan yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap dan display produk industri dan perdagangan di Kalbar dan tempat diskusi / tukar menukar informasi antar pelaku usaha dan dengan aparat.

B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU-ISU STRATEGIS

Potensi Sumber daya alam baik pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan Kalbar sangat tinggi dan diindikasikan menjadi *supplier* bagi Negara-negara tetangga dan China yang lebih menikmati nilai tambah karena terjadinya perlambatan pertumbuhan sektor industri Kalbar.

Selain itu saat ini telah terbitnya **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU no 32 tahun 2004. UU ini diharapkan dapat dicermati dan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan di daerah termasuk bidang industri dan perdagangan; disusul pada awal tahun 2015 juga telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang merupakan jaban atas program TRISAKTI yaitu 1) berdaulat secara politik, 2) berdikari secara ekonomi, dan 3) berkepribadian secara sosial & budaya, dengan 9 (sembilan) agenda prioritas atau yang dikenal dengan NAWA CITA yang merupakan janji Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo.

Untuk itu beberapa isu-isu penting di bidang industri dan perdagangan yang menjadi perhatian adalah :

B.1. Perindustrian

Sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri kalbar antara 3-4% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana kontribusi sektor industri juga belum mengalami peningkatan yang berada pada kisaran 16-17% dimana angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2000 sebesar 24,15%.

Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

1. Menurunnya kinerja industri kayu dan lambannya perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang hanya berbentuk industri hulu dimana peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil.
2. Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pada sektor industri. Selain itu, masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak pada sektor industri turut mempengaruhi lambannya pengembangan sektor industri kecil dan menengah;
3. Belum stabilnya harga komoditi pada level internasional serta rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga semakin tingginya biaya produksi yang menyebabkan enggannya perusahaan untuk meningkatkan produksinya;
4. Belum Optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat, ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri, serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua masalah sarana prasana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri;

B.2. Perdagangan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 sebesar US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspor menurun sebesar US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$.203,88 juta atau sebesar 32,70 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$.827,30 juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017.

Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

- 1) Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
- 2) Keberlanjutan perang dagang antar negara yang dapat akan berdampak pada perdagangan Kalbar;
- 3) Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perkayuan (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
- 4) Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/ regulasi nasional;
- 5) Belum maksimalnya pintu ekspor-impor resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit.

Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan dengan sistem logistik daerah yang belum efisien sehingga menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat serta permasalahan rendahnya daya saing produk daerah akibat dari minimnya pemasaran. Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya.

TABEL 4. PERKEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2008 s/D 2018

Tahun	EKSPOR		IMPOR		NERACA PERDAGANGAN	
	(US\$) F.O.B	Pertumb yoy (%)	(US\$) C.I.F	Pertumb yoy (%)	(US\$)	Pertumb yoy (%)
2008	898.268.395	23,64	103.025.225	23,64	795.243.170	25,44
2009	536.455.899	-40,28	157.972.129	53,33	378.483.770	-52,41
2010	922.052.102	71,88	153.833.298	-2,62	768.218.804	102,97
2011	1.867.796.771	102,57	298.443.471	94,00	1.569.353.300	104,28
2012	1.300.863.351	-30,35	539.364.364	80,73	761.498.987	-51,48
2013	1.348.607.972	3,67	498.236.319	-7,63	850.371.653	11,67
2014	651.986.280	-51,65	500.262.690	0,41	151.723.590	-82,16
2015	564.043.389	-13,49	627.820.186	25,50	-63.776.797	-142,03
2016	623.420.000	10,53	351.840.000	-43,96	271.580.000	525,83
2017	827.300.000	32,70	269.070.000	-23,52	558.230.000	105,55
2018	1.006.960.000	61,52	543.890.000	54,58	463.070.000	70,51

Sumber : BPS Kalbar, 2019. (data diolah)

Pertumbuhan Ekonomi Kalbar saat ini masih dibentuk utamanya oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkisar antara 52-56 % dari PDRB Kalbar dan ekspor hanya berperan sebesar 22-31 % dalam kurun 2008-2012. Hal ini menunjukkan pasar Kalimantan Barat cukup besar dan jika dapat dimanfaatkan untuk penumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa oleh pengusaha lokal terutama UMKM, maka akan sangat membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kalbar yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan).

Masyarakat Ekonomi Asean / Asean economic Community (MEA/AEC 2015). Secara bertahap ASEAN yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja memastikan diri masuk dalam babak baru percaturan geoekonomi dan geopolitik global. Salah satu keputusan strategis tersebut yaitu pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2009, semua negara-negara ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan sepakat Piagam ASEAN memasuki tahap *entry to force*, sehingga tiga pilar ASEAN Community yang meliputi **ASEAN Economic**

Community, ASEAN Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community akan segera diimplementasikan dan ditargetkan terintegrasi penuh pada tahun 2015¹, Pembentukan ASEAN Community tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Beberapa isu terpenting dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain kesiapan dunia usaha baik daerah dan nasional untuk menghadapi persaingan dengan ASEAN baik di dalam negeri maupun di pasar ASEAN, serta kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menyambut MEA 2015. *Namun hal mendasar yang harus mendapatkan perhatian semua pemangku kepentingan di daerah dan nasional, khususnya dunia usaha, adalah pentingnya perubahan cara pandang dalam menyikapi persaingan yang timbul dari AEC 2015.* Persaingan dari luar tidak lagi dianggap sebagai ancaman, namun sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. *Karena kunci kemenangan dalam pasar bebas adalah daya saing.* Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan daya saing bagi produk barang dan jasa Indonesia. Hal itu dilakukan antara lain untuk menjamin perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual, memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan arus investasi sektor infrastruktur, dan menyempurnakan kebijakan insentif dan disinsentif yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha yang berdaya saing utamanya sektor industri dan perdagangan. Sekaligus juga melakukan upaya-upaya menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

“Siapkah Kalbar menyediakan kebutuhan masyarakat Kalbar terutama pangan dalam jumlah cukup dan berkualitas ?” baik dari hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri. Untuk itu peranan industri dan perdagangan dalam menunjang kemandirian pangan daerah sangat krusial. Mulai dari penguatan industri yang mendukung mekanisasi & sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, sarana distribusi dan pemasarannya serta penerapan standarisasi dan keamanan pangan yang dihasilkan



GAMBAR 4 LOGO AKU CINTA INDONESIA (100% INDONESIA)

¹yang semula ditargetkan pada tahun 2020 sesuai hasil KTT Asean 1997, namun dipercepat implementasinya menjadi tahun 2015 sesuai hasil KTT di Cebu pada tahun 2007, dan pada akhirnya pada tahun 2013 berdasarkan hasil evaluasi bersama negara-negara Asean diundur pelaksanaan menjadi 1 januari 2016.

Instrumen gerakan Aku Cinta Produk Indonesia (100% Indonesia) saat ini dikembangkan menjadi Gerakan Aku Cinta Produk Kalbar dan Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk pengamanan perdagangan dalam menghadapi implementasi MEA 2015 sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dilihat dari PDRB Penggunaan Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir komponen yang dominan adalah Konsumsi Rumah Tangga dimana rata-rata pada kurun waktu tersebut mencapai diatas 52%, dan merupakan potensi basis pasar pengembangan daya saing industri dan perdagangan daerah.

Perlindungan Konsumen, Namun demikian di sisi lain berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan konsumen merupakan salah satu kewenangan yang berada di tingkat provinsi, untuk di Kalimantan Barat sendiri masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan luas wilayah yang terdiri dari 14 kab/kota dengan jarak tempuh yang jauh sangat sulit untuk dapat memaksimalkan pengawasan tersebut.

Program Etalase Nasional. Program ini diluncurkan Presiden pada saat Peninjauan ke Entikong, Sanggau beberapa waktu yang lalu. Keinginan Presiden sangat sederhana, yaitu ***agar daerah perbatasan Indonesia termasuk di Kalimantan Barat harus lebih baik dari negara tetangga.*** Untuk itu Presiden menuntut Kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk segera mewujudkan hal tersebut pada tahun ini juga. Respon Bapak Presiden ini terhadap daerah perbatasan, tidak hanya, harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat oleh daerah (Provinsi & Kab), namun juga diharapkan agar dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Kalbar dan Nasional. Sehingga strategi pembangunan daerah perbatasan, juga merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah dan Nasional. Kalbar harus dapat memanfaatkan daerah perbatasan sebagai potensi dan peluang untuk meningkatkan daya saing daerah (dan nasional)serta kesejahteraan masyarakat. Karena secara alamiah daerah perbatasan seperti di Kalbar sesungguhnya merupakan **daerah pertemuan dua sumberdaya kedua negara** tersebut. Sehingga di beberapa negara dunia, **daerah perbatasan dijadikan daerah cepat tumbuh.** Kalimantan Barat **harus dapat memanfaatkan daerah perbatasan** dan sumberdaya yang ada di Sarawak, Malaysia untuk meningkatkan daya saing Kalbar terutama aksesibilitas Sarawak ke dan dari pasar dunia dengan dukungan infrastruktur dan pelabuhannya yang sangat baik. Untuk itu kita harus mampu membangun Terminal Barang Ekspor-impor yang didukung dengan pembangunan sentra produksi dan kawasan industri, sehingga barang-barang yang kita ekspor utamanya adalah barang-barang yang telah diolah dengan nilai tambah tinggi.

Pembangunan Pelabuhan Kijing dan rencana **Pembangunan Rel Kereta Api** di Kalimantan Barat. Kedua hal ini harus segera didukung dengan perencanaan dan pembangunan pusat-pusat produksi dan pusat-pusat distribusi. Diharapkan sentra produksi pertanian dan sentra produksi industri terutama kawasan industri di Kalimantan Barat terhubung dengan pelabuhan dan rel kereta api. Dan diharapkan Kalimantan Barat dalam **sistim logistik nasional** dapat ditingkatkan dari **hanya sebagai pusat distribusi provinsi (PDP)** menjadi **pusat distribusi regional (PDR)**, mengingat pusat distribusi Kalbar tidak hanya melayani wilayah Kalimantan Barat, tetapi juga pulau-pulau terluar Provinsi lain misalnya Kepulauan Natuna. Saat ini berdasarkan sistim logistik nasional PDP Kalbar bersama-sama Kaltim dan Kalteng **menginduk kepada PDR Banjarmasin-Kalsel**. **Pusat Distribusi** ini kedepannya dalam Sislognas akan **memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan barang-barang pokok dan barang-barang strategis** di wilayah yang dilayaninya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1 Visi

“Terwujudnya Industri Yang Maju Dan Perdagangan Yang Tangguh Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Barat”

- Industri yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kalbar maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil dan antara hulu-hilir), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang tangguh mengandung makna bahwa perdagangan di Kalbar diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kalbar bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kalbar (dari gejala kelangkaan stok utamanya bahan pokok & strategis serta keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalimantan Barat berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh Usaha Menengah – Besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalbar.

A.2. Misi

1. Menumbuh kembangkan sektor industri untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kalimantan Barat
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kalimantan Barat.

A.3. Moto

Industri Maju dan Perdagangan Tangguh untuk pertumbuhan, pemerataan dan kesejahteraan Kalbar

A.4 Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a) Tujuan dan Sasaran Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindag Provinsi Kalbar berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
1	Revitalisasi dan penguatan struktur industri Kalbar	1	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat
2	Meningkatkan stabilitasi dan penguatan pasar lokal yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri	2	meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri yang didukung dengan pengamanan perdagangan daerah
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri daerah yang berkualitas	3	meningkatnya ekspor daerah dan terkendalinya impor

b) Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk penjabaran tujuan dan sasaran strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama setiap sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Bidang Penanggung Jawab
1	2	3		4	5
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	IAKTAPI, ILMATMET PSDI, SIIPI IKM, DAN UP IPOK
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	%	DAGRI
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	DAGLU DAN UPSMB
		3.2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	

Ket : Perubahan indikator sesuai dengan Hasil Reviu bersama Biro Organisasi

B. PERJANJIAN KINERJA

B.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat Terpilih mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, dengan format seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah:

TABEL 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Target Kinerja 2018
1	2	3		4	5
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun	%	16,16
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	%	5,2
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	700
		3.2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	225

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	840.846.050	*)
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.319.188.000	**)
3	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	536.063.575	*)
	<i>Dukungan UPSMB</i>	1.872.630.618	*)
4	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	591.989.000	**)
5	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	2.841.255.658	*)
	<i>Dukungan UPT IPOK</i>	1.580.775.048	*)
6	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.322.000.000	**)
7	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	304.324.500	*)
	<i>Sekretariat</i>	2.420.646.670	*)
TOTAL		13.629.719.119	

Ket : *) Anggaran pada Dinas Perindag Prov. Kalbar
 **) Anggaran Pada UPT Dinas Perindag Prov. Kalbar

B.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, terdapat perubahan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai upaya dalam mewujudkan sasaran pemanta[an pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan target indikator yang telah ditetapkan tersebut, terdapat indikator yang diamanatkan kepada Dinas Perindag Prov. Kalbar yaitu :

TABEL 7 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2018 DALAM RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Neraca Perdagangan yang Didukung Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan	Juta US\$	1.850	DINAS PERINDAG PROV. KALBAR
	Neraca Perdagangan	Juta US\$	450	
	Angka Inflasi	%	4,5	
	Nilai Ekspor	Juta US\$	2.220,32	
Meningkatnya Nilai Tambah Sumber Daya	Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah, dan Kecil)	Unit Usaha	250	
	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar	%	5	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat nomor 159 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Terdapat beberapa perubahan nama program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindag Prov. Kalbar telah digunakan pada tahun 2018. Namun dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Terpilih serta adanya reuiu atas Indikator yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi sebelumnya, maka terjadi perubahan yang sangat signifikan pada IKU Dinas Perindag Prov. Kalbar Tahun 2018 dimana pada tahun tersebut hanya menggunakan 4 (empat) indikator yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani bersama Gubernur Terpilih.

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018 serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada matrik di bawah.

A.1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar (SS1)

TABEL 8 CAPAIAN KINERJA SS1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2018		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar	16,16%	16,10%	99,63
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1						99,63

Sumber : BPS Kalbar 2019.

Pada tahun 2018, pencapaian indikator kinerja tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan perlambatan sebesar 0,11%.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 9 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	4.422.030.705	4.178.925.014	94,50	99,63	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,50 (yang diemban oleh seluruh bidang industri dan UP IPOK) dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,63%, maka pada sasaran ini masih belum efisien dikarenakan capaian kerjanya belum mencapai 100%

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian berbagai indikator capaian juga merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari Kab/Kota terkait dengan penumbuhan dan pengembangan sektor industri. Namun di lain sisi, pencapaian kinerja tersebut harus didukung oleh instansi vertikal lain serta faktor eksternal untuk turut serta dalam menunjang hal-hal lain terkait dengan penumbuhan dan pengembangan sektor industri Kalbar.

Untuk melihat pencapaian target tahunan dari 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2016 – 2018 (SS1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SAT	Realisasi			Target 2019
					2016	2017	2018	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar	%	16,10	16,11	16,51	-

Sumber : BPS Kalbar 2019.

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar, Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017, terjadi sedikit penurunan pada kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar sebesar 0,11% dimana nilai kontribusi pada tahun 2017 tercatat sebesar 16,21% (*Y-on-Y*) dibandingkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 16,10%.

Kontribusi tersebut tak lepas dari adanya peningkatan kinerja sektor pertambangan yang menyumbang lebih dari 50% nilai ekspor Kalbar. Namun disisi lainnya penurunan kinerja sepanjang 2018 yang dialami oleh dua industri utama di Kalimantan Barat, yaitu industri pengolahan karet dan CPO. Penurunan harga jual pada level internasional serta pelemahan rupiah yang tidak kunjung membaik semakin berdampak pada kontribusi sektor industri Kalbar.

Selanjutnya Produksi karet olahan pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan hasil liaison KPwBI Kalbar kepada berbagai perusahaan produsen karet olahan, diperoleh informasi bahwa sulitnya memperoleh pasokan karet mentah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kalbar menyebabkan penurunan produksi tersebut. Penyebabnya adalah usia mayoritas tanaman karet di Kalbar yang sudah cukup tua sehingga produktivitas karet yang dihasilkan rendah sehingga petani banyak yang mencampur hasil sadapan karet dengan benda-benda lain untuk memperbesar volume produksi.

Kedepannya rencana beroperasi kembalinya salah satu pabrik pengolahan alumina yang ada di Kalimantan Barat dapat mendorong produksi industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan pada sektor industri pengolahan Kalimantan Barat di Tahun berikutnya.

Selanjutnya pada Tahun 2019 indikator tersebut tidak akan digunakan kembali sehingga tidak terdapat target pada Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Rancangan Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar 2019-2023.

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Belum tercapainya target Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar disebabkan belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Selain itu minimnya kualitas serta terbatasnya akses pasar menyebabkan perusahaan enggan meningkatkan kapasitas produksinya ditambah dengan menurunnya harga komoditi di pasar internasional tanpa dapat diprediksi menyebabkan semakin sulitnya meningkatkan kontribusi sektor industri Kalbar.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya memfasilitasi percepatan penumbuhan Kawasan Industri Kalbar. Dengan terbangunnya Kawasan Industri Kalbar diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Kalbar yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar.

A.2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah (SS2)

TABEL 11 CAPAIAN KINERJA (SS2)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2018		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	5,2%	3,82%	136,13
RERATA CAPAIAN KIENRJA SS 2						136,13

Pada Tahun 2018, pencapaian dari indikator tersebut menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dimana rata-rata pencapaiannya mencapai 136,13%. Hal tersebut tidak lepas dari peran Kab/Kota dalam mengawasi perkembangan pencapaian indikator tersebut terutama pada hari besar keagamaan.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 12 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	840.846.050	720.887.300	85,73	136,13	50,4

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,73% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 136,13%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 50,4.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator capaian ini merupakan bentuk partisipasi yang tinggi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kab/Kota. Dengan stabilnya harga jual barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar dimasyarakat menyebabkan inflasi kelompok bahan makanan pada Tahun 2018 dapat dikendalikan dengan baik serta jauh dibawah target yang telah ditetapkan. (inflasi semakin kecil realisasi maka semakin baik)

Untuk melihat pencapaian target tahunan dari 2016 hingga 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 13 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN 2016 – 2018 (SS2)

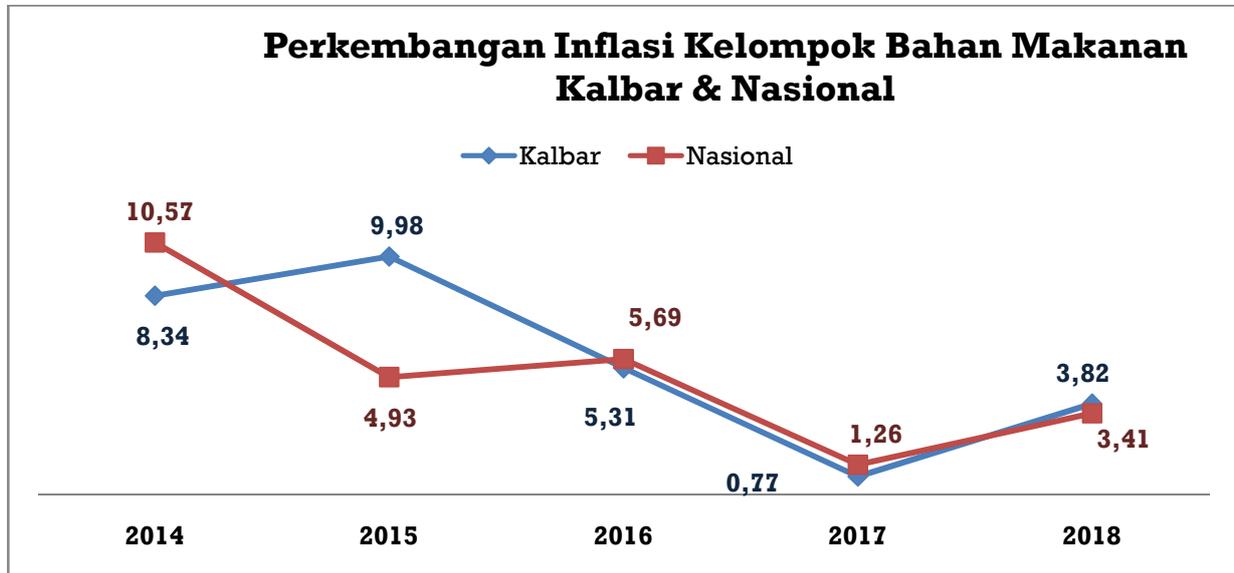
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target
					2016	2017	2018	2018
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	%	5,31	0,77	3,82	3,8

Inflasi (Kelompok Bahan Makanan), Pertumbuhan inflasi kelompok bahan makanan meningkat tajam apabila dibandingkan pada Tahun 2017, namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran yang disebabkan oleh inflasi pada tahun 2017 merupakan tahun jenuh. Penurunan angka inflasi pada Tahun 2017 sangat signifikan apabila dibandingkan pada Tahun 2014 sehingga kenaikan inflasi pada Tahun 2018 merupakan hal yang wajar.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, Asosiasi pedagang, KADIN, Bulog, Pelindo, Kepolisian, Pertamina dll. Beberapa kegiatan dinas perindag untuk mengantisipasi inflasi terutama pada waktu-waktu tertentu yaitu Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan serta Monitoring Bahan

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dukungan Kementerian Perdagangan juga sangat besar dalam stabilnya inflasi Tahun 2018, terdapat pemantauan harga yang dilaksanakan setiap hari dimana apabila terdapat kenaikan harga yang signifikan dapat segera diketahui serta diatasi.

GAMBAR 5 PERKEMBANGAN INFLASI BAHAN MAKANAN



Sumber : BPS Kalbar 2019. (data diolah)

Berdasarkan statistik diatas, inflasi kelompok bahan makanan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017. Besarnya penurunan angka inflasi kelompok bahan makanan selama 2 tahun sebelumnya tidak dapat dipertahankan karena terlalu rendahnya angka inflasi pada tahun 2017. Selain itu, kenaikan harga pangan juga tidak dapat dihindari yang disebabkan oleh beberapa bahan pangan konsumsi merupakan komoditas perdagangan antar pulau dimana harga jual akan mengikuti fluktuasi harga.

Rata-rata Inflasi kelompok bahan makanan Kalbar selama 5 (lima) tahun belakang masing berada dibawah Nasional. Hal tersebut membuktikan banyaknya daerah lain yang mengalami inflasi lebih besar. Inflasi kelompok bahan makanan Nasional juga mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2014. Besarnya perhatian pemerintah akan inflasi merupakan peluang kedepannya dalam rangka menstabilkan harga pokok dan barang penting terutama di wilayah Kalbar dimana besarnya luas wilayah serta minimnya penganggaran menjadi permasalahan yang sangat besar dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya kelompok bahan makanan tetap terjaga.

Selanjutnya pada Tahun 2019 indikator tersebut tidak akan digunakan kembali sehingga tidak terdapat target pada Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Rancangan Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar 2019-2023. Namun indikator tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan

dimana indikator inflasi kelompok bahan makanan akan menjadi indikator kinerja program.

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian strategis ini yaitu jauhnya jarak tempuh antar Kabupaten sehingga menyebabkan tidak seluruh Kabupaten dapat terjangkau dalam terutama pada saat menyambt hari besar keagamaan. Namun kerjasama yang baik serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kab/Kota terbukti dapat mengendalikan inflasi kelompok bahan makanan di masing-masing daerah.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pendanaan kepada Pemerintah Pusat sehingga dapat menjangkau seluruh daerah. Selain itu kedepannya diharapkan diterapkannya pelaporan harga setiap hari pada masing-masing daerah agar seluruh kendala yang ditemu dapat segera diatasi.

A.3 Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengendalian Impor (SS3)

TABEL 14 CAPAIAN KINERJA SS3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2018		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ 700 Juta	US\$ 1.006,96 Juta	143,85
		3.2	Neraca Perdagangan	US\$ 225 Juta	US\$ 543,89 Juta	241,73
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 3				

Sumber : BPS Kalbar 2019. (data diolah).

Peningkatan kinerja ekspor pada Tahun 2018 secara langsung berdampak pada pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi instansi vertikal lainnya yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kinerja ekspor Kalbar. Selain itu, investasi yang telah masuk ke Kalbar sebelumnya turut memberikan hasil yang menggembirakan dengan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekspor Kalbar pada Tahun 2018.

- **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TABEL 15 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	2.408.694.192	2.287.177.038	94,96	192,8	97,84

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,96% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 192,8%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 97,84.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari kontribusi pada golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) serta Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) dimana kegua golongan barang tersebut memberika kontribusi sebanyak 45,45% dan 25,18% dari total ekspor Kalbar. Adanya Peraturan tentang diperbolehkannya kembali ekspor bahan baku juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan ekspor Kalbar.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pencapaian target tahunan 2016 – 2018 dan target 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 16 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN SS 3 TAHUN 2016 – 2018 (SS3)

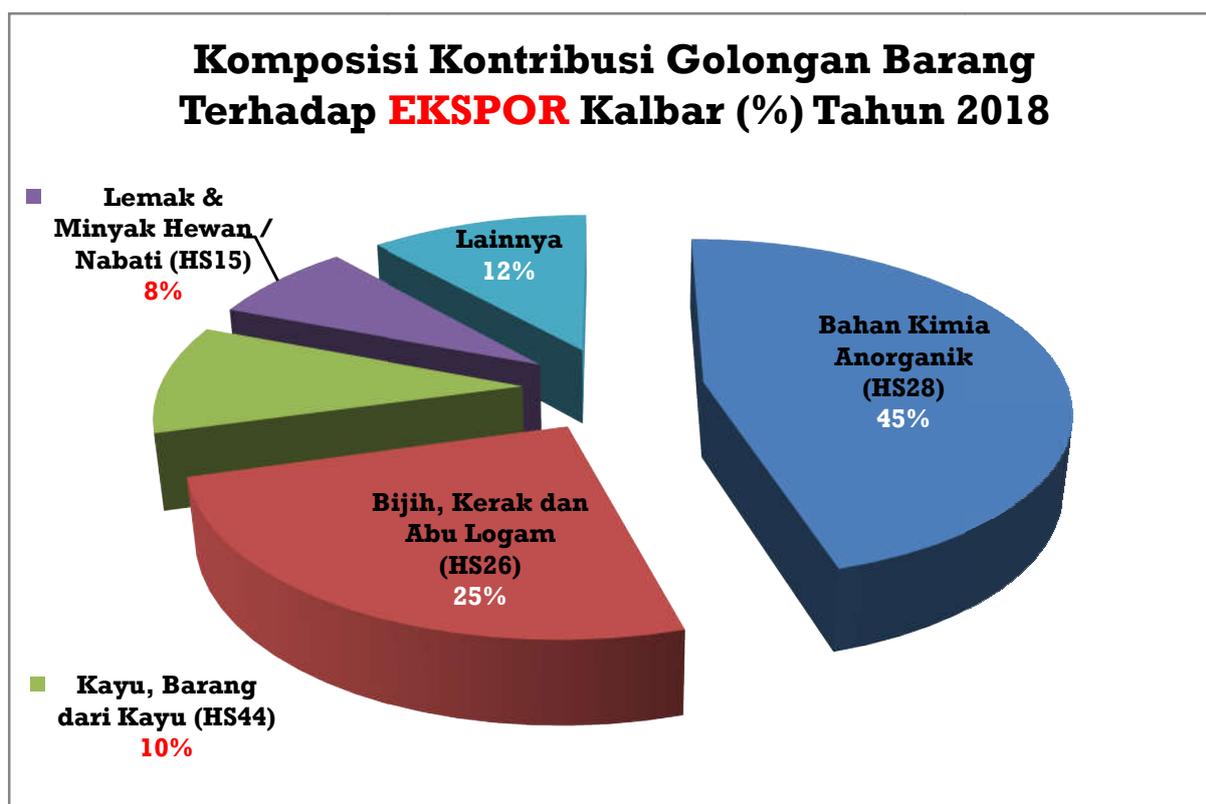
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi			Target 2019
					2016	2017	2018	
					R	R	R	
1	2	3		4	5	6	7	8
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	623,42	827,3	1.006,96	850
		3.2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	271,58	558,23	543,89	300

Sumber : BPS Kalbar 2019. (data diolah).

Nilai Ekspor Kalimantan Barat, Pelarangan bahan tambang yang diberlakukan pada Tahun 2014 sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekspor Kalbar. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya hirisasi di Kalbar sehingga mayoritas barang ekspor Kalbar saat ini masih merupakan bahan mentah dan belum berupa produk dimana hal tersebut tidak hanya dialami oleh Pemda Kalbar, namun juga dialami oleh daerah lainnya. Kecenderungan tersebut menyebabkan terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu, Permen ESDM No 5/2017 yang menjelaskan salah satunya tentang Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan keluar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal berlakunya permen ESDM no. 5/2017 setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi dan Permendag No.1/2017 yang menjelaskan bahwa Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah Memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau, Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM, masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d 11 Januari 2022. Pasca terbitnya peraturan diatas, Ekspor Kalbar mulai kembali menggeliat dengan menunjukkan trend yang positif dimulai pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, ekspor Kalbar kembali meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada golongan barang Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26) dengan peningkatan lebih dari 381% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2017. Sedangkan nilai ekspor tertinggi masih diisi oleh Bahan Kimia Anorganik (HS28) dengan nilai US\$ 457,69 Juta. Penurunan terbesar terdapat pada golongan barang Karet dan Barang dari Karet (HS40) dimana terjadi penurunan sebesar 73% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Berdasarkan hasil liaison KPw BI Provinsi Kalimantan Barat kepada berbagai perusahaan produsen karet olahan di Kalimantan Barat, diperoleh informasi bahwa penurunan produksi disebabkan oleh sulitnya memperoleh pasokan karet mentah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Usia sebagian tanaman karet di Kalimantan Barat sudah cukup tua sehingga mempengaruhi produktivitas karet. Hal ini mendorong sebagian petani mencampur hasil sadapan karet di luar spesifikasi untuk memperbesar volume produksi.



Sumber : BPS Kalbar, 2019. (data diolah)

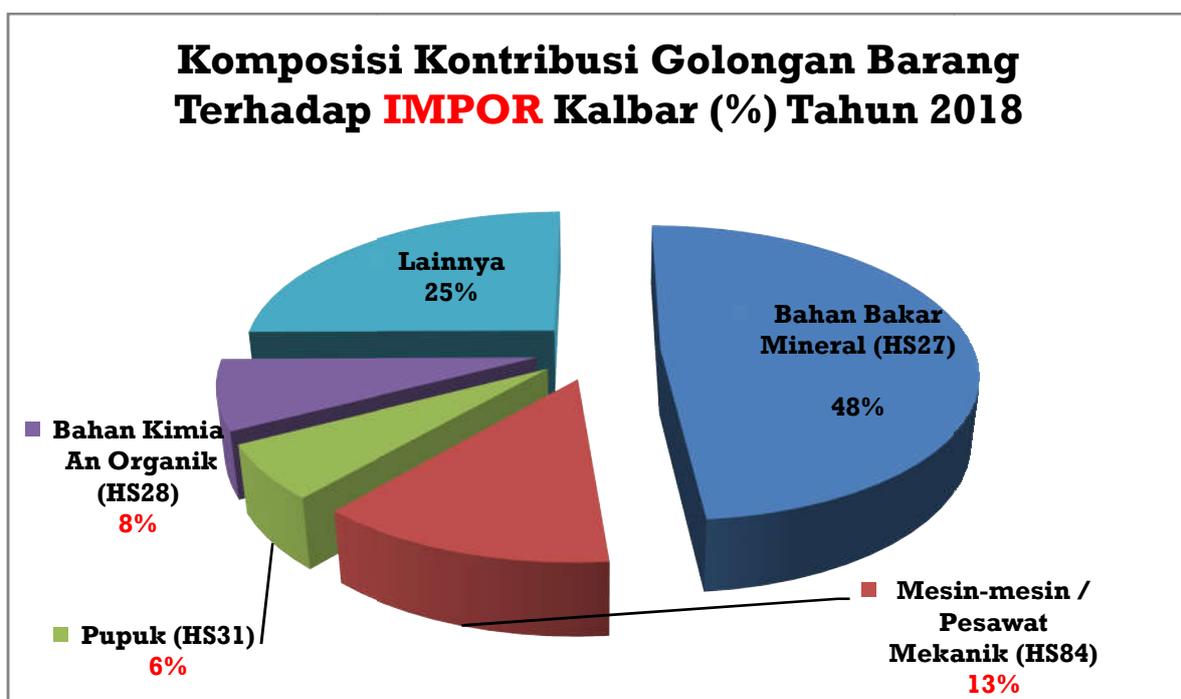
Selain kebijakan dalam negeri yang mendorong peningkatan ekspor Kalbar, harga komoditi dunia pada 2018 yang cenderung naik bila dibandingkan dengan tahun 2017 juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor Kalbar. Melihat dari kebijakan ekspor pertambangan pada 2018, Kalbar masih dapat meningkatkan nilai ekspornya akan tetapi relaksasi kebijakan ekspor ini seharusnya tidak membuat Kalbar hanya terfokus pada ekspor mineral tambang yang masih setengah mentah dan dapat mengolah lebih lanjut produk tersebut menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi (meningkatkan manufaktur produk tersebut lebih tinggi).

Nilai impor Kalbar pada Tahun 2018 meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 (BPS Kalbar, 2019) terutama pada HS 27 impor Bahan Bakar Mineral dimana kenaikannya mencapai 111% apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. sedangkan Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (HS84) sedikit meningkat yaitu sebesar 4,94%. Peningkatan impor barang modal diharapkan sebagai indikasi akan terjadinya peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Barat. Karena selama ini tingginya nilai importasi Kalbar tidak perlu dikhawatirkan karena mendukung investasi dan atau hilirisasi komoditi utama Kalbar yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja ekspor Kalbar kedepan. Hal ini sudah dibuktikan dengan semakin tingginya ekspor bahan kimia (berupa alumina) dan CPO.

Neraca Perdagangan, Neraca perdagangan daerah sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang meningkat tajam, namun sejak tahun 2012 menurun akibat pembatasan ekspor bahan tambang sesuai dengan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mulai mengalami kontraksi yang cukup kuat hingga puncaknya pada tahun 2015 pertama kali dalam sejarah terjadi defisit neraca perdagangan Kalbar. Namun demikian, hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena peningkatan importasi Kalimantan Barat lebih disebabkan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang investasi sawit dan pengolahan alumina. Peningkatan neraca perdagangan Kalbar Tahun 2017 mencapai 105,55% apabila dibandingkan dengan Tahun 2016. Secara kumulatif nilai neraca perdagangan Kalbar Tahun 2018 Surplus US\$ 543,89 juta. Namun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017, maka neraca perdagangan mengalami penurunan yaitu sebesar US\$ 95,16 Juta (-17,05%).

Namun hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu kecenderungan menurunnya impor Kalbar tidak selamanya baik. **Persepsi yang berkembang saat ini adalah menurunnya impor akan menandakan baiknya perdagangan suatu daerah.** Namun hal hanya berlaku apabila mayoritas impor merupakan barang konsumsi. Sedangkan di Kalbar, penurunan impor dapat juga diartikan bahwa terdapat permasalahan pada dunia investasi Kalbar. Hal tersebut disebabkan oleh struktur impor Kalbar selain pada bahan bakar mineral adalah Permesinan (HS 84) yang menandakan masuknya investasi di Kalbar yang akan meningkatkan nilai ekspor kedepannya.

GAMBAR 7 KOMPOSISI KONTRIBUSI IMPOR KALBAR 2018



Sumber : BPS Kalbar, 2019. (data diolah)

- **Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran Strategis**

Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis ini yaitu tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatasi oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar.

- **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan di atas diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Kalbar. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Kalbar.

B. CAPAIAN KINERJA IKU PROVINSI

Pada Tahun 2018, Dinas Perindag Prov. Kalbar mengamban 6 (enam) indikator daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018. Terdapat 2 (dua) indikator tersebut yang juga menjadi indikator kinerja utama Dinas Perindag Prov. Kalbar yaitu Nilai Ekspor dan Neraca Perdagangan Kalbar.

Namun perlu disampaikan lebih lanjut bahwa terdapat perbedaan target pada indikator yang tertuang pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 serta Perubahan Renstra Dinas Perindag Prov. Kalbar 2013-2018. Perbedaan yang cukup signifikan terjadi pada indikator Nilai Ekspor Kalbar dimana target yang tertuang dalam indikator kinerja daerah lebih tinggi sebesar 217% apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Dinas Perindag Prov. Kalbar.

Selanjutnya pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diamanatkan pada Dinas Perindag Prov. Kalbar pada Tahun 2018 dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 17 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALIASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Neraca Perdagangan yang Didukung Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan	Juta US\$	1.850	1470,03	79,46
	Neraca Perdagangan	Juta US\$	450	543,89	120,86
	Angka Inflasi	%	4,5	3,99	112,78
	Nilai Ekspor	Juta US\$	2.220,32	1006,96	45,35
Meningkatnya Nilai Tambah Sumber Daya	Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah, dan Kecil)	Unit Usaha	250	261	111,60
	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar	%	5	2,75	55
Rarata Capaian Indikator					78,43

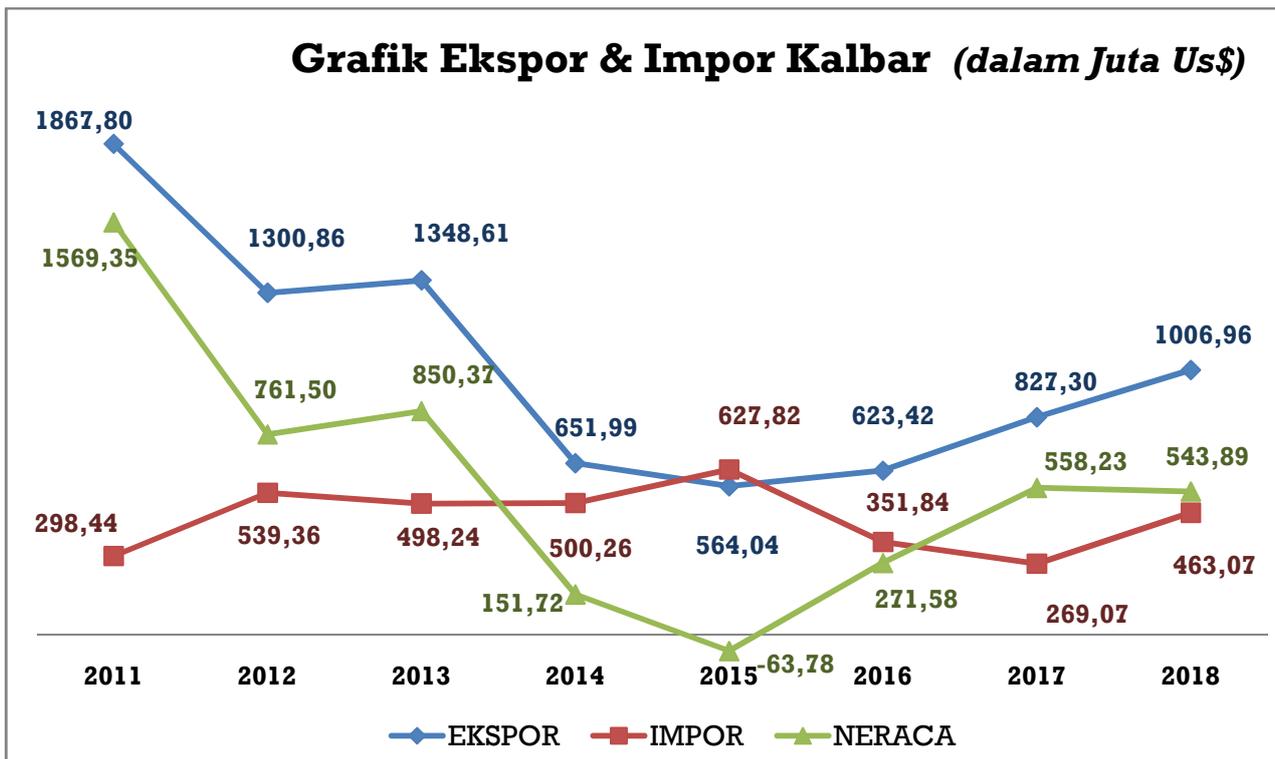
Sumber : BPS Kalbar 2019.

Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Daerah, terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target. Terdapat berbagai permasalahan baik *internal* maupun *eksternal* yang masih perlu segera diselesaikan dimana hal tersebut **bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindag saja**, namun dibutuhkan upaya dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja industri dan perdagangan Kalbar. Selanjutnya pencapaian target Kinerja Pembangunan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- **Nilai Transaksi Perdagangan; Neraca Perdagangan; dan Nilai Ekspor.**

Indikator tersebut juga merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindag Prov. Kalbar. Namun target yang telah ditetapkan sangatlah berbeda terutama pada target Ekspor daerah dimana target pada Dokumen RPJMD Kalbar sebesar US\$ 2.220,32 Juta. Hal tersebut dirasa sangat sulit terwujud dengan banyaknya permasalahan yang ada saat ini. Sebagai perbandingan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, ekspor tertinggi Kalbar terjadi pada tahun 2011 dengan nilai sebesar US\$ 1.867,8 Juta.

GAMBAR 8 PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN KALBAR 2011-2018



Sumber: BPS Kalbar, 2019. (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat jelas terdapat penurunan nilai ekspor terutama pada tahun 2014 dimana penurunan kinerja ekspor daerah apabila dibandingkan tahun 2013 mencapai - **US\$ 696,62 Juta (-51,65%)**. Hal tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya pelarangan ekspor bahan tambang mentah berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

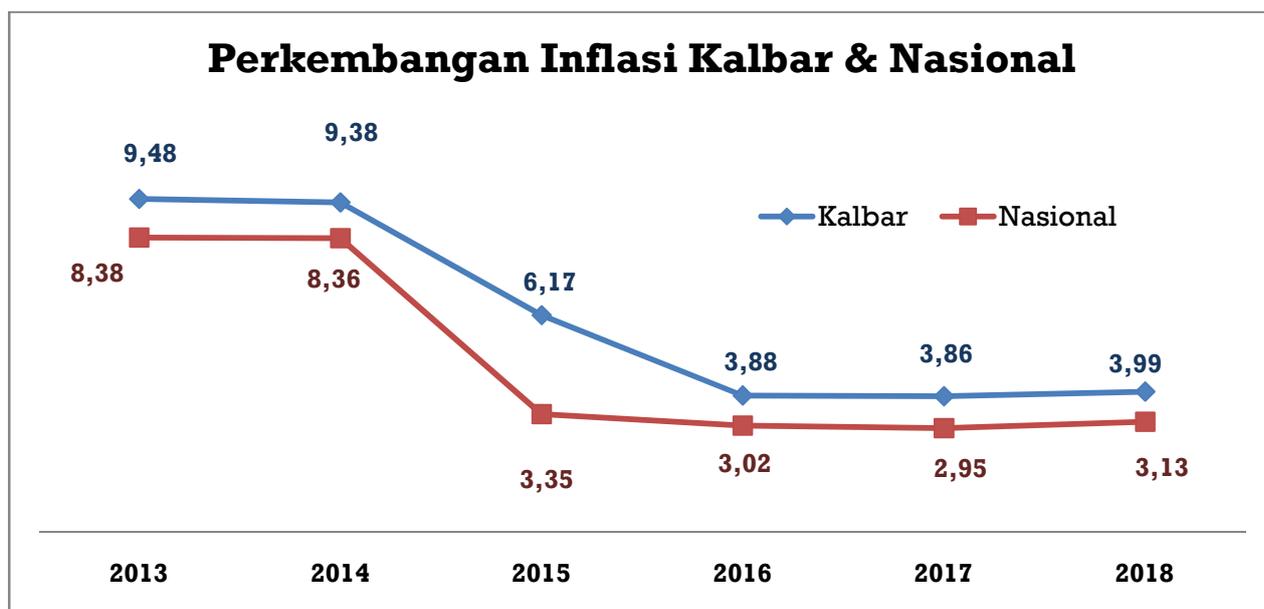
Selain hal tersebut, penurunan signifikan terjadi pada golongan barang Karet dan Barang dari Karet (HS40) dimana pada tahun 2011 kontribusi golongan barang tersebut terhadap ekspor Kalbar mencapai US\$ 965,56 Juta. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada saat ini dimana hanya mencapai US\$ 51,19 Juta atau merosot hingga - **US\$ 914,37 Juta (-94,7%)**.

Namun trend yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja ekspor secara bertahap. Masuknya investasi pengolahan sumber daya mineral pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan adanya peningkatan terhadap golongan barang Bahan Kimia Anorganik (HS28) dimana kondisi pada tahun 2015 berkontribusi sebesar US\$ 9,64 juta, meningkat sangat signifikan menjadi US\$ 430,19 Juta. Hal tersebut merupakan kabar baik dan perlu ditingkatkan sehingga ekspor Kalbar kedepannya tidak mengandalkan pada ekspor bahan baku saja.

- **Angka Inflasi,**

Secara umum, nilai inflasi Kalbar menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa inflasi Kalbar selalu berada diatas inflasi nasional. Hal tersebut menandakan Kalbar merpuakan salah satu penyumbang inflasi yang besar dalam pencapaian Inflasi Nasional pada Tahun 2018. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus agar kedepannya pencapaian inflasi kalbar dapat lebih baik dibandingkan pada Tahun 2018.

GAMBAR 9 PERKEMBANGAN INFLASI KALBAR 2013-2018



Sumber : BPS Kalbar 2019. (data diolah)

Pencapaian angka inflasi pada tahun 2018 cukup jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,5%. Dengan capaian kinerja sebesar 112,78% membuktikan bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2018 dapat dinyatakan berhasil. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak baik pusat dan daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Terkendalnya inflasi juga ditengarai merupakan dampak dari tidak adanya kenaikan tarif listrik sepanjang 2018. Sementara itu, terjadinya beberapa kali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi relatif memberikan dampak terhadap inflasi, namun terbatas. Di sisi lain, tekanan harga pada kelompok bahan makanan di Kalimantan Barat cukup tinggi, terutama pada awal tahun dan pertengahan tahun seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terkait HBKN dan liburan sekolah. Relatif tingginya tekanan harga pada kelompok bahan makanan ini menahan penurunan harga lebih jauh lagi di Kalimantan Barat pada tahun 2018

- **Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah, dan Kecil),**

Pada tahun 2018, Pencapaian indikator tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian sebanyak 261 Unit usaha atau mencapai 104,40% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut dilihat dari jumlah unit usaha yang tumbuh dan berkembang pasca dilatih dan dibina oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar baik melalui dana APBD maupun APBN yang telah diterima. Selain melalui pelatihan, juga terdapat kegiatan bimbingan pasca pelatihan serta pelayanan desain kemasan kepada unit usaha yang dibina.

Pencapaian kinerja tersebut diukur melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain :

1. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 26 s.d 29 Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 13 s.d 15 November 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
3. Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 25 s.d 26 Oktober 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 9 April s.d 5 Mei 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 24 Unit Usaha.
5. Kegiatan Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku industri yang dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 26 s.d 27 September 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
6. Kegiatan Bimbingan Pasca Pelatihan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Unit Usaha yang telah dilatih dengan realisasi kinerja sebanyak 27 Unit Usaha.
7. Kegiatan Pelayanan Desain Merek dan Kemasan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan realisasi sebanyak 30 Unit Usaha.
8. Bimbingan Teknis Gula Merah Berbasis Aren dilaksanakan di Sekadau pada tanggal 25 s.d 28 September 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
9. Bimbingan Teknis Desain Motif Tenun dilaksanakan di Ketapang pada tanggal 17 s.d 20 Desember 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
10. Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Kerajinan Anyaman Pandan dilaksanakan di Kayong Utara pada tanggal 14 s.d 17 November 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.
11. Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Kerajinan Rotan dan Bambu dilaksanakan di Sambas pada tanggal 23 s.d 26 Oktober 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.

12. Pelatihan Perbengkelan dilaksanakan di Landak pada tanggal 18 s.d 20 Juli 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 20 Unit Usaha.

- **Laju Pertumbuhan Industri Kalbar,**

Laju Pertumbuhan Industri Kalbar Tahun 2018 belum menunjukkan nilai yang memuaskan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,75%. Faktor yang menyebabkan lambannya laju pertumbuhan industri pada tahun 2018 yaitu melemahnya harga karet dan CPO internasional serta nilai tukar rupiah yang semakin rendah sepanjang tahun 2018.

GAMBAR 10 PERKEMBANGAN HARGA DUNIA KARET DAN CPO

World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet)

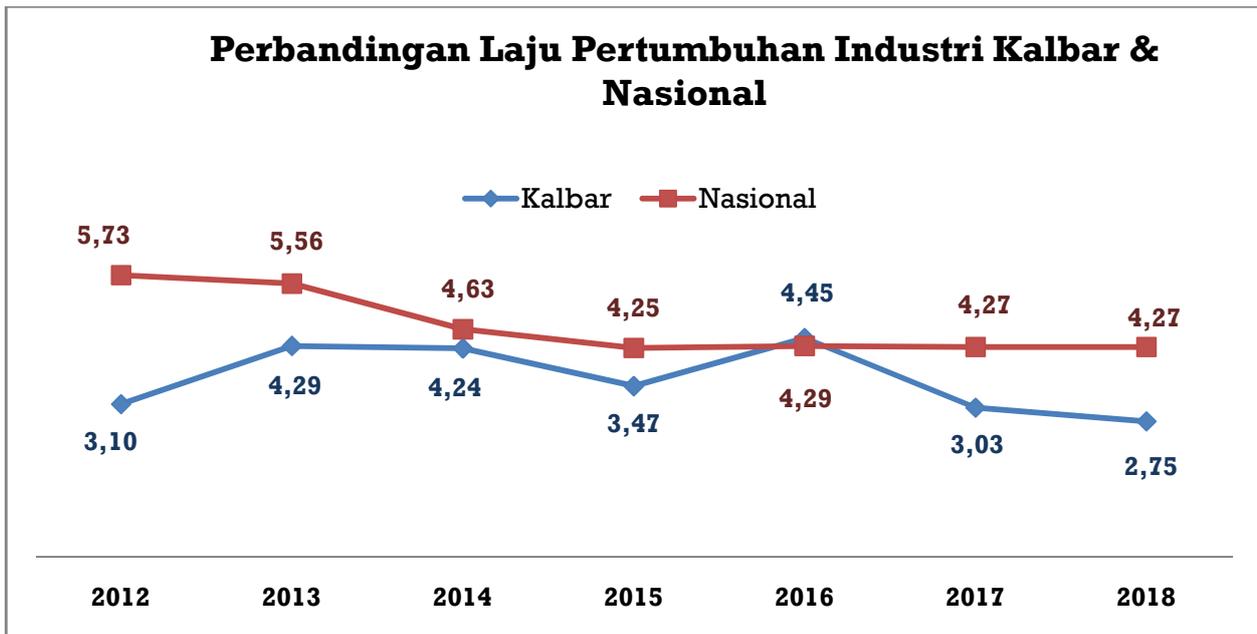
Commodity	Unit	Annual Averages			Quarterly Averages				Monthly Averages			
		Jan-Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Oct-Dec	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dec	Oct	Nov	Dec
		2016	2017	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Other Raw Materials												
Cotton	\$/kg b/	1.64	1.84	2.01	1.80	1.99	2.09	2.07	1.91	1.91	1.91	1.90
Rubber, RSS3	\$/kg b/	1.61	2.00	1.57	1.62	1.73	1.66	1.46	1.40	1.43	1.35	1.44
Rubber, TSR20	\$/kg	1.38	1.67	1.37	1.45	1.47	1.40	1.33	1.27	1.32	1.23	1.26
Food												
Oils and Meals												
Coconut oil **										0	787	796
Fishmeal **										5	1,479	1,480
Groundnuts **										5	1,224	1,213
Groundnut oil **	\$/mt b/	1.381	1.461	1.446	1.408	1.434	1.450	1.465	1.435	1.434	1.438	1.435
Palm oil **	\$/mt b/	736	751	639	718	706	682	612	555	590	539	535
Peanut meal oil	\$/mt	1,301	1,268	927	1,390	1,192	800	881	141	780	708	738
Soybean meal **	\$/mt b/	375	350	405	355	414	447	391	369	380	366	361
Soybean oil **	\$/mt b/	815	850	789	878	850	805	765	736	752	729	728
Soybeans **	\$/mt b/	405	393	394	393	412	421	370	374	368	374	381

Komoditi Karet dan CPO mengalami penurunan harga komoditi yang cukup tinggi apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Sumber : Pink Sheet Word Bank 2019.

Peningkatan produksi karet dan CPO yang terjadi pada triwulan III 2018 tidak berlanjut pada Triwulan IV sehingga terlalu mendongkrak kinerja industri pengolahan karena tertahan oleh pelemahan harga komoditas pada level internasional. Ditambah dengan permasalahan sulitnya memperoleh pasokan karet mentah dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kalbar sehingga menyebabkan penurunan produksi karet semakin mendalam. Penyebabnya adalah usia mayoritas tanaman karet di Kalbar yang sudah cukup tua sehingga produktivitas karet yang dihasilkan rendah sehingga petani banyak yang mencampur hasil sadapan karet dengan benda-benda lain untuk memperbesar volume produksi.

GAMBAR 11 PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI 2012-2018



Sumber : BPS Kalbar 2019. (data diolah)

Dilihat dari gambar diatas, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kalbar mengalami penurunan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor-faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi kinerja sektor industri dimana hingga saat ini masih didominasi oleh komoditi tradisional (sawit, karet, dan bauksit) yang belum seluruh perusahaan yang bergerak pada industri tersebut melakukan hilirisasi produk. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Kalbar hampir selalu dibawah nasional yang menandakan minimnya pergerakan baik penumbuhan maupun pengembangan sektor industri pengolahan yang secara langsung mempengaruhi kontribusi sektor industri pada nilai PDRB Kalbar

Disisi lain, rencana beroperasi kembalinya salah satu pabrik pengolahan alumina yang ada di Kalimantan Barat diprediksi akan dapat mendorong peningkatan produksi industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan pada sektor industri pengolahan Kalimantan Barat kedepannya.

C. REALISASI ANGGARAN

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar berasal dari dua sumber yaitu APBD Prov. Kalbar dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Rekapitulasi anggaran beserta realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL 18 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
BERSUMBER APBD DAN APBN PROVINSI TA. 2018 (DALAM RUPIAH)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	840.846.050	720.887.300	85,73	*)
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.319.188.000	1.074.486.514	81,45	**)
3	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	536.063.575	445.170.349	83,04	*)
	<i>Dukungan UPSMB</i>	<i>1.872.630.618</i>	<i>1.842.006.689</i>	<i>98,36</i>	<i>*)</i>
4	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	591.989.000	586.455.700	99,07	**)
5	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	2.841.255.658	2.675.848.636	94,18	*)
	<i>Dukungan UPT IPOK</i>	<i>1.580.775.048</i>	<i>1.503.076.378</i>	<i>95,08</i>	<i>*)</i>
6	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.322.000.000	1.255.193.009	94,95	**)
7	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	304.324.500	274.911.800	90,34	*)
	<i>Sekretariat</i>	<i>2.420.646.670</i>	<i>2.348.480.238</i>	<i>97,02</i>	<i>*)</i>
TOTAL		13.629.719.119	12.726.516.613	93,37	

Ket : *) Anggaran pada Dinas Perindag Prov. Kalbar
**) Anggaran Pada UPT Dinas Perindag Prov. Kalbar

B.1. SASARAN STRATEGIS 1 (SS1)

“TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR ”

Sasaran strategis (SS) 1 terdiri dari 1 indikator kinerja utama (IKU) yang direalisasikan pada tahun 2018 melalui satu program yaitu Program Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri (yang dilaksanakan oleh bidang IAKTAPI, ILMATMET PSDI, dan SIIPI IKM) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.841.255.658,- dan realisasi sebesar Rp. 2.675.848.636,- (94,18%); Dukungan oleh UPT IPOK pada program yang sama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.580.775.048,- dan realisasi sebesar Rp. 1.503.076.378,- (95,08%). SS1 juga mendapatkan dukungan Dana APBN pada Kementerian Perindustrian melalui Dirjen IKM yang mengalokasikan Dekonsentrasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1.322.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.255.193.009,- (94,95%).

Apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar memiliki anggaran sebesar Rp. 5.744.030.706,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.434.118.023,- (94,60%)

B.2. SASARAN STRATEGIS 2 (SS2)

“PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH”

Sasaran strategis (SS2) terdiri dari 1 indikator kinerja utama (IKU) yang direalisasikan pada tahun 2018 melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 840.846.050,- dan realisasi sebesar Rp. 720.887.300,- (85,73%). SS2 juga mendapatkan dukungan Dana APBN pada Kementerian Perdagangan melalui Dirjen PDN yang mengalokasikan Dekonsentrasi Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 1.319.188.000,- dengan realisasi Rp. 1.074.486.514,- (81,45%).

Apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 2.160.034.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.795.373.814,- (83,12%)

B.3. SASARAN STRATEGIS 3 (SS3)

“PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR”

Sasaran strategis (SS3) memiliki 2 indikator kinerja utama (IKU) yang dicapai melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 536.063.575,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.170.349,- (83,04%); serta Dukungan UPSMB dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.872.630.618,- dan realisasi sebesar Rp. 1.842.006.689,- (98,36%). SS3 juga mendapatkan dukungan Dana APBN pada Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PLN yang mengalokasikan Dekonsentrasi Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 591.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 586.455.700,- (99,07%).

Apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 3 Peningkatan Ekspor Daerah Dan Pengendalian Impor memiliki anggaran sebesar Rp. 3.000.683.193,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.873.632.738,- (95,77%)

TABEL 19 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI APBN TA. 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.322.000.000	1.255.193.009	94,95
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.319.188.000	1.074.486.514	81,45
3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	591.989.000	586.455.700	99,07
T O T A L		3.233.177.000	2.916.135.223	90,19

BAB IV PENUTUP

Bab Penutup dalam laporan ini dibagi kedalam dua subbab yaitu subbab Kesimpulan dan Subbab Saran. Kesimpulan memuat ringkasan keseluruhan laporan, sementara saran merupakan usulan solusi atau tindak lanjut dalam menindaklanjuti kendala-kendala yang dihadapi.

A. KESIMPULAN

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan TUSInya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 119 tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dalam menjalankan urusan perindustrian dan perdagangan Kalimantan Barat, pada tahun 2018 Dinas Perindag Prov. Kalbar di perkuat oleh 116 orang pegawai dengan susunan 1 orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris, 5 kepala bidang, 2 kepala UPT, serta 24 orang pejabat eselon IV. Dinas juga didukung oleh Pejabat fungsional seperti Penguji Mutu Barang, Arsiparis dan Penyuluh industri. Selain itu pada TA 2018 Dinas Perindag Prov. Kalbar didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker) yang menangani Dekonsentrasi APBN.
3. Saat ini Dinas menempati 1 unit gedung yang berlokasi di Kota Pontianak dan 2 UPT di lingkungan Dinas masing-masing menempati 1 unit gedung. Kendala yang dihadapi terkait dengan sarana prasarana adalah lantai dua gedung lama eks-Kanwil Depperindag Prov. Kalbar yang perlu direhab, lingkungan kantor perlu di lakukan perbaikan mengingat kerap terjadi banjir pada saat hujan intensitas tinggi, memerlukan tersedianya ruangan display yang berguna untuk menjadi tempat pameran tetap, display produk Industri dan perdagangan serta tempat tukar menukar informasi antar pelaku-antara pelaku dengan aparat dan antara aparat dengan aparat pemerintah di Kalbar.
4. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perindag Prov. Kalbar menjalankan 3 sasaran strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan melalui 3 program teknis serta program-program rutin. Selain itu Dinas Perindag Prov. Kalbar juga didukung oleh 3 program nasional yang terdiri dari 1 program Kementerian Perindustrian dan 2 program kementerian perdagangan, ketiga program tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dilakukan melalui pengukuran 4 IKU Dinas.

5. Total Anggaran yang diterima oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar dari APBD Provinsi sebesar Rp. 23.250.107.178,- yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.853.565.059,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 10.396.542.119,-. Dari total belanja langsung tersebut, UPT di lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar mendapatkan porsi sebesar Rp. 3.453.405.665,- sisanya sebesar Rp. 6.943.136.453,- merupakan anggaran yang diemban oleh dinas. Sementara itu total anggaran yang bersumber dari Dekonsentrasi APBN Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan berjumlah Rp. 3.233.177.000,- yang terbagi ke dalam 3 satker.
6. Pencapaian atau realisasi terhadap target IKU pada TA 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - i) Sasaran strategis 1 (SS1) "TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR" rata-rata capaian terhadap target sebesar 98,64%
 - ii) Sasaran Strategis 2 (SS2) "PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH" memperoleh rata-rata capaian sebesar 136,13%.
 - iii) Sasaran Strategis 3 (SS3) "PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR" memperoleh rata-rata capaian sebesar 177,23%.
7. Realiasi Keuangan per sasaran strategis dirincikan sebagai berikut:
 - i) SS 1 terdiri dari Program Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri (yang dilaksanakan oleh bidang IAKTAPI, ILMATMET PSDI, SIIPI IKM, dan UPT IPOK) yang apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 1 Tumbuh Dan Berkembangnya Sektor Industri Kalbar memiliki anggaran sebesar Rp. 5.744.030.706,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.434.118.023,- (94,60%)
 - ii) SS 2 terdiri dari Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen dan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Yang Didukung Dengan Pengamanan Perdagangan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 2.160.034.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.795.373.814,- (83,12%)
 - iii) SS3 terdiri dari Program Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri dan UPSMB) yang apabila dijumlahkan total keseluruhan untuk Sasaran Strategis 3 Peningkatan Ekspor Daerah Dan Pengendalian Impor memiliki anggaran sebesar Rp. 3.000.683.193,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.873.632.738,- (95,77%).

B. SARAN

Dalam Subbab ini digambarkan secara ringkas permasalahan terkini urusan perindustrian dan perdagangan serta solusi atau tindak lanjut yang dapat diambil.

B.1. Urusan Perindustrian

Permasalahan :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri kalbar antara 3-4% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana kontribusi sektor industri juga belum mengalami peningkatan yang berada pada kisaran 16-17% dimana angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2000 sebesar 24,15%.

Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditi utama Kalbar baik Karet, Kelapa Sawit, maupun Bauksit dimana saat ini masih terpaku pada produk tertentu (setengah jadi) sehingga perlu upaya pengembangan lebih lanjut agar.
2. Minimnya sarana dan sarana dasar (kelistrikan, air bersih, jalan, dsb) dalam rangka mendukung investasi sektor industri Kalbar. Pentingnya realisasi pembangunan perwilayahan industri baik Kawasan Industri maupun Sentra Industri akan menawarkan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kalbar.
3. Minimnya kompetensi SDM Industri agar dapat mengespoitasi SDA yang dimiliki oleh daerah. Peningkatan SDM Industri merupakan hal yang psangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah.
- 4.
5. Menurunnya kinerja industri kayu dan lambannya perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang hanya berbentuk industri hulu dimana peningkatan nilai tambahnya relatif sangat kecil.
6. Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Kalimantan Barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi sumber daya manusia pada sektor industri. Selain itu, masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak pada sektor industri turut mempengaruhi lambannya pengembangan sektor industri kecil dan menengah.

7. Belum stabilnya harga komoditi pada level internasional serta rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga semakin tingginya biaya produksi yang menyebabkan enggan nya perusahaan untuk meningkatkan produksinya;
8. Belum Optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat, ini disebabkan oleh dua hal utama, pertama terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri, serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua masalah sarana prasana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri;

Solusi :

1. **Mempersiapkan fasilitas-fasilitas utama dan penting** bagi pertumbuhan dan perkembangan industri serta sarana dan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan akan dapat meningkatkan investasi industri di Kalimantan Barat;
2. **Meningkatkan nilai tambah produk (Hilirisasi)** yang sejalan dengan perluasan pemasaran dan daya saing produk industri; peningkatan Inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta peningkatkan koordinasi antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi (dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha industri; serta perumusan kebijakan daerah untuk mendukung industri) sehingga dapat mendongkrak kontribusi sektor industri Kalbar;
3. Mendorong seluruh Pemerintah Kab/Kota untuk segera **menyelesaikan Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK)** yang selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat, sehingga akan tercipta keselarasan dalam rencana pembangunan industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dari sisi SDM, Sarana, dan prasarana industri;
4. **Pendataan unit usaha Industri** yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun dalam implementasinya, diketahui bahwa sangat diperlukannya pengelompokan industri terutama IKM berdasarkan potensi, skala pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai

langkah kedepannya dalam penumbuhan, pembangunan dan pengembangan industri di Kalimantan Barat.

B.2. Urusan Perdagangan

Permasalahan :

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 sebesar US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspor menurun sebesar US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$.203,88 juta atau sebesar 32,70 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$.827,30 juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut tergambar dari pencapaian ekspor sampai dengan bulan November 2018 yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017.

Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

1. Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
2. Keberlanjutan perang dagang antar negara yang dapat akan berdampak pada perdagangan Kalbar;
3. Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perkayuan (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
4. Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/ regulasi nasional;
5. Belum maksimalnya pintu ekspor-impor resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit.

Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan dengan sistem logistik daerah yang belum efisien sehingga menyebabkan rentannya ketersediaan

2. Mendorong **percepatan Revisi Permendag 35/1995 Penetapan** sebagai pintu ekspor dan impor pada PPLB Entikong dan Badau serta Tempat Penimbunan sementara kepabean (Bongkar muat) didukung percepatan pembangunan Terminal Barang Ekspor Impor pada PPLB tersebut dan secara bersamaan mendorong Pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya ekspor melalui mekanisme goods in transit untuk komoditi CPO dan komoditi lainnya melalui pelabuhan di Sarawak – Malaysia.
3. **Menjaga stabilitas Inflasi Kelompok Bahan Makanan** melalui kegiatan-kegiatan untuk Menjaga stabilitas pasokan/stok dan harga. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan perbaikan sistem logistik daerah dalam rangka menjamin terjaganya ketersediaan pasokan/stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat
4. **Memberikan publikasi dan edukasi** kepada masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri; serta meningkatkan Pengawasan Barang Beredar terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Pontianak, 2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,



MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP.19600310 198203 1 011

LAMPIRAN 1 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

OPD : Dinas Perindag Prov. Kalbar
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Capaian Kinerja Tahun 2018		Tingkat Kemajuan (%)
					Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6	7
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar	%	16,16	16,10	99,63
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1					
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1	Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	%	5,2	3,82	136,13
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 2					
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1	Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ Juta	700	1006,96	143,85
		3.2	Neraca Perdagangan	US\$ Juta	225	543,89	241,73
		RERATA CAPAIAN KINERJA SS 3					

Jumlah Total Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2018 : Rp. 13.629.719.119,-
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Startegis Tahun 2018 : Rp. 12.726.516.613,-

Pontianak, 2019

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,



MUHAMMAD RIDWAN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP.19600310 198203 1 011

LAMPIRAN 2 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon (0561) 732610 - 766127 - 732740 - 769704 - 734917 Fax. (0561) 766128
PONTIANAK - 78116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

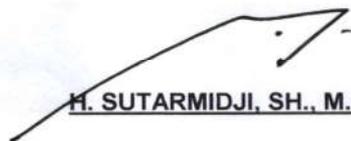
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

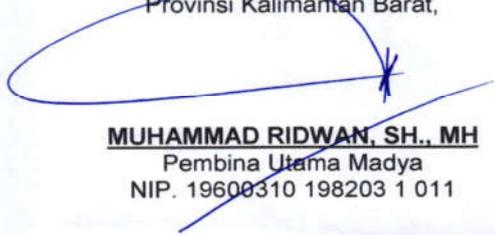
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 2018

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Kalimantan Barat,


MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600310 198203 1 011

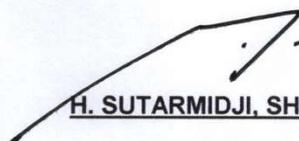
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA SEKTOR INDUSTRI KALBAR	1.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar	16,16 %
2	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAERAH	2.1 Inflasi (Kelompok Bahan Makanan)	5,2 %
3	PENINGKATAN EKSPOR DAERAH DAN PENGENDALIAN IMPOR	3.1 Nilai Ekspor Kalimantan Barat	US\$ 700 Juta
		3.2 Neraca Perdagangan	US\$ 225 Juta

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 840.846.050	APBD
2.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 1.319.188.000	APBN
3.	Program Peningkatan Ekspor Dan Pengendalian Impor	Rp. 536.063.575	APBD
	Dukungan UPSMB	Rp. 1.872.630.618	APBD
4.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Rp. 591.989.000	APBN
5.	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri	Rp. 2.841.255.658	APBD
	Dukungan UPT IPOK	Rp. 1.829.692.300	APBD
6.	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 1.322.000.000	APBN
7.	Program Dukungan Manajemen Pengembangan Industri dan Perdagangan	Rp. 304.324.500	APBD
	Sekretariat	Rp. 2.420.646.670	APBD
TOTAL		Rp. 13.878.636.371	APBD + APBN

Pontianak, 2018

Pihak Kedua,
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum

Pihak Pertama,
 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
 Provinsi Kalimantan Barat,


MUHAMMAD RIDWAN, SH., MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600310 198203 1 011